

Tantangan Umat Islam dalam Pembangunan



Oleh
Muhammad Hamzah

Gerakan Sarvodaya di Sri Lanka berhasil merumuskan infrastruktur sosial-ekonomi yang mencerminkan pola keadilan dan kebersamaan. Dua prinsip yang ditekankan dalam Islam itu, agaknya belum dibarengi dengan upaya optimal pemeluknya di Indonesia untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Inilah barangkali salah satu tantangan umat Islam untuk berperan serta dalam membangun negerinya

Tujuan utama pembangunan di Indonesia yaitu membentuk manusia seutuhnya. Ini bermakna bahwa nuansa keseimbangan yang termanifestasi sebagai manusia pribadi dan sosial serta kepentingan antara dunia dan ukhrawi menjadi "main goal" (tujuan utama).

Roda pembangunan di Indonesia sendiri pada galibnya beriringan dengan gerakan modernisasi yang melanda dunia pada saat ini, sehingga corak pembangunan di negeri kita ini pun diwarnai corak modernisasi tersebut. Kondisi ini tampaknya menjadi konsekuensi logis dari trend interdependensi antar negara di dunia, artinya nasib suatu bangsa dan negara tidak dapat dilepaskan dari nasib negara dan bangsa lain. Manifestasi interdependensi itu dapat berbentuk hubungan yang sifatnya simbiosis, tetapi juga ada yang sifatnya parasitisme. Hal ini tergantung kuantitas dan kualitas dari sumber daya masing-masing negara.

Dengan demikian sindrom yang tidak dapat dihindari saat ini, adalah gerak modernisasi yang mempunyai karakteristik akselerasi yang besar-besaran di bidang sains dan teknologi telah menjarah keseluruhan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Keadaan ini merupakan cermin dari potret manusia masa kini yang merasa tidak puas, oleh karena itu manusia menghendaki lebih banyak dari yang mungkin akan diperoleh dan dapat dimilikinya. Homo sapiens melalui proses evolusi telah mengembangkannya suatu kombinasi sifat ingin tahu, kreativitas dan keberaniannya. Watak-watak tersebut telah menyebabkan keberhasilan manusia, namun sekaligus juga menghadapkan pada masalah-masalah yang gawat. Jadi, meski dikatakan bahwa perubahan teknologi merupakan faktor sentral yang dikandung keberadaannya manusia, namun tidaklah berarti pula bahwa teknologi dapat dikatakan bertabiat mandiri (autonomous) yaitu pengubah tak terikat (independent variable) dalam peradaban manusia. Dalam bentuk kongkritnya sekarang sebagai

peradaban industri sebenarnya merupakan wujud gabungan dari semua dorongan yang ada pada diri manusia yaitu rasa ingin tahu, permainan, moralitas, semuanya menyatu dengan dorongan ingin berkuasa. Peradaban industri yang mempunyai dasar

Karena nafsu manusia mempunyai sifat selalu tidak puas, hal ini sering menjadikan sains dan teknologi sebagai alat dari struktur global dari ketidakadilan, perbudakan dan penindasan.

utama pada perkembangan sains dan teknologi itu, sebenarnya merupakan instrumen semata-mata untuk meningkatkan kekuasaan manusia terhadap lingkungan alamnya dan manusia lainnya, agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk makan, berpakaian dan perlindungan serta nafsunya. Karena nafsu manusia mempunyai sifat selalu tidak puas, hal ini sering menjadikan sains dan teknologi sebagai alat dari struktur global dari ketidakadilan, perbudakan dan penindasan. Akibat selanjutnya seperti disinyalir oleh Isaiu Fujimoto, biarpun teknologi mengaku bebas dari nilai-nilai netral, bermanfaat bagi setiap orang dan tidak bertujuan politik namun pada kenyataannya corak teknologi yang dilimpahkan senantiasa membawa berbagai embel-embel, termasuk tentang apa-apa yang ada nilainya dan apa yang tidak ada nilainya siapa yang hanya mendapat manfaat sedikit saja.¹

Mungkin dapat sebagai contoh kasus dalam usaha peternakan unggas banyak peternak kecil yang gulung tikar karena

1 Mangun Wijaya, Y.B. 1985, Teknologi dan Dampak Kebudayaan, Yayasan Obor Indonesia Jakarta

sebagian besar faktor produksi (pakan, bibit ternak, pemasaran hasil) banyak dikuasai oleh pengusaha besar sehingga nasib peternak kecil di tentukan oleh pengusaha besar.

Contoh lain, yang dihadapi oleh nelayan tradisional telah kehilangan sumber pencahariannya di laut akibat mekanisasi alat penangkap ikan oleh pengusaha besar dalam rangka melayani kerakusan negara-negara industri, hal ini berarti menurunkan pendapatan dan konsumsi protein hewani dari penduduk yang sumber proteinnya hanya semata-mata dari ikan.

Problem-problem sebagai dampak pengimporan model teknologi Barat oleh negara-negara berkembang juga makin mencolok. Akibat pengoperan paradigma tersebut secara hantam kromo ternyata membuat dunia ketiga (termasuk Indonesia) menjadi tidak makin pandai. Kenyataan yang ada hanyalah gap antara golongan kaya dan miskin yang semakin melebar, apakah suatu drama yang tragis akibat pengoperan yang hantam kromo juga terjadi di Indonesia?. Pada masa lalu keblingeran Indonesia milirik keberhasilan Barat mendorong aplikasi model pembangunan John Maynerd Keyne yang dikultuskan masyarakat barat. Di Indonesia berjalannya model pembangunan ini tidaklah semulus seperti yang diharapkan, yang diinginkan adalah "trickle down effect" namun yang timbul justru "trickle up effect" akibatnya bukan pemerataan yang dicapai melainkan jurang yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin.

Bila kita menganalisa lebih dalam, kegagalan dunia ketiga itu, bukan saja akibat kesalahan penerapan paradigma yang tidak disesuaikan dengan kondisi psiko-sosial dan cultural bangsa. Tetapi juga di

sebabkan sikap dunia barat sendiri sebagai induk pemilik paradigma teknologi saat ini, ketika orang Barat memasukkan hasil sains dan teknologi mereka ke dunia ketiga bukannya tanpa pamrih sama sekali.

Studi secara historis telah membuktikan bahwa dunia Barat memang memiliki watak yang memiliki praktek kolonial, sehingga sampai sekarangpun mereka masih suka melakukan praktek-praktek neokolonialisme. Neokolonialisme melalui pengaruh multi nasional corporation, meskipun tidak menduduki wilayah secara fisik, akan

tetapi mereka dapat mengatur, mengontrol dan merampoknya. Hal ini di tempuh dengan cara menempatkan para elite di dalam dunia ke tiga dalam struktur global dari kekuasaan, pemberian hak-hak istimewa dan kekayaan yang melimpah. Para politisi dan birokrat, militer, akademisi dan komunikasi elite menerima keunggulan modernisasi gaya Barat berikut aturan-aturan sains dan teknologi yang ada didalamnya, pada hal disana ada aturan sistem kontrol

global, hegemoni dan eksploitasi². Lebih ngeri lagi mereka menyuntikkan keinginan terhadap produk-produk yang luka, maka "demonstration effect" (efek pamer) itu yang menyebabkan masyarakat kita semakin sulit untuk menabung, sebab sebagian besar uang yang mereka peroleh digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang yang luks. Bahkan jangan heran kalau dalam masyarakat kita, problem yang dihadapi bukan hanya "Saving" yang rendah, melainkan sistem pembelian secara kredit yang menjamu dan meresap pada jiwa masyarakat kita. Lebih ironis lagi uang hasil kredit dianggap sebagai hadiah yang semestinya untuk meningkatkan usahanya tetapi

² Ibid

"Demonstration effect" (efek pamer) itu yang menyebabkan masyarakat kita semakin sulit untuk menabung, sebab sebagian besar uang yang mereka peroleh digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang luks.

Merupakan suatu hal yang absurd, jika kaum optimisme teknologi yakin bahwa penyakit sosial yang disebabkan oleh teknologi tinggi dapat diatasi dengan melibatkan banyak teknologi itu sendiri.

digunakan untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Karena itulah Victor C. Ferkise, sedari awal telah memperingatkan bahwa bahaya terbesar yang dihadapi manusia dalam penghujung abad ke 20 ini sesungguhnya tidak terletak pada kejayaan nilai-nilai teknologi, tetapi pada subordinasi nilai-nilai kesejahteraan yang lebih awal dibawah teknologi beserta eksploitasinya oleh mereka yang tidak memahami implikasi dan akibatnya, melulu untuk mengejar kepuasan pribadinya sendiri atau tujuan-tujuan kelompoknya.³

Selanjutnya dalam beberapa tahun terakhir ini gerakan lingkungan yang dilembagakan secara global dibawah United Nations Environment Programme telah mengemukakan betapa perlu dan mendesaknya untuk mengadakan sebuah riset guna menemukan sains dan teknologi yang secara ekologis tepat untuk negara-negara yang sedang berkembang maupun bagi negara-negara industri yang telah berkembang secara salah.

Dengan melihat kondisi permasalahan diatas, maka diperlukan suatu paradigma pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosio psikologis dan kultur bangsa kita. Kita tidak dapat menganut paradigma negara-negara Barat yang mengunggulkan homo economicus dari pada jenis manusia lainnya : Homo aestheticus, theoriticus, religius, politicus dan sebagainya. Sebab kita pun melihat bahwa 'homo economicus' ternyata tidak berhasil mengatasi problema psiko-sosial yang ada di negara Barat. Sehingga merupakan suatu hal yang absurd, jika kaum optimisme teknologi yakin bahwa penyakit sosial yang disebabkan oleh teknologi tinggi dapat diatasi dengan

³ Ibid

melibatkan banyak teknologi itu sendiri. Untuk itulah kita memerlukan terobosan baru suatu model Model Pembangunan yang menyertakan kode etik tertentu bagi pelaku (aktor) pembangunan yakni manusianya sendiri.

GERAKAN SARVODAYA SALAH SATU ALTERNATIF

Implikasi teknologi yang sembrono tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis tapi juga manusianya. Kita dapat melihat bagaimana dengan nafsunya ia menjarah terus menerus sumber yang ada di alam tanpa memperhitungkan dampak negatifnya terhadap sistim ekologi. Misalnya : pembukaan pertambangan yang besar dan luas, lalu mengurasnya, penebangan kayu hutan secara liar, kerusakan tanah pertanian akibat banjir, sungai-sungai penuh endapan sampah produksi dari pabrik-pabrik. Di samping itu golongan lemah pun kecipratandebunya yang tidak sedap dari dampak masuknya teknologi modern. Misalnya : pengikisan orang-orang miskin yang sedang tumbuh dengan aktivitas produktif dengan pemekaran bentuk-bentuk teknologi yang padat modal lewat goncangan-goncangan ketidakadaan pekerjaan.

Studi tentang hal tersebut di banyak negara menghasilkan pola yang sama, yaitu merosotnya upah riil bagi sementara petani. Banyak petani dan pengrajin kecil telah terenggut dari tanah atau usahanya, tercaploknya usaha kecil oleh pengusaha besar, petani gurem oleh petani yang lebih kaya; diusirnya petani penyewa oleh para tuan tanah yang mengharap keuntungan dari teknologi baru atau untuk menghindari ancaman reformasi sewa menyewa. Tampaknya ketidakadilan selalu menimpa kaum yang lemah. Kondisi seperti ini memberi

Jika Sarvodaya menggali sumber kekuatan dari nilai-nilai spiritual ajaran Buddha, maka negara kita pun dapat menggali kekuatan itu dari nilai-nilai spiritual ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia.

motivasi munculnya berbagai gerakan masyarakat di beberapa negara terbelakang atau sedang berkembang yang pada hakekatnya untuk memberi simpati kepada kelompok masyarakat lapisan bawah.

Salah satu gerakan rakyat yang cukup populer di Asia adalah gerakan Sarvodaya Sharmadana di Srilangka. Gerakan ini lahir dan tumbuh bersama adat istiadat di Sri Langka yang berakar kuat pada keyakinan agama Budha. Tujuan pokok dari gerakan ini adalah kebangkitan menyeluruh dari kepribadian perorangan, berdasarkan empat nilai utama Budhisme, yaitu metta (keramahan), karuna (belas kasih), mudhita (suka cita bersama) dan upekkha (ketenangan/keseimbangan budi). Sharmadana yang berarti membentuk suatu infrastruktur sosial dan ekonomi yang berlandaskan semangat kebersamaan masyarakat yang kuat.⁴ Aksi sosial kemasyarakatan benar-benar bertolak dari dan untuk kepentingan rakyat, bahkan mereka menolak definisi dan model Barat untuk program pembangunan karena tidak melibatkan nilai-nilai spiritual dan karenanya umat manusia terseret ke tempat yang tidak memiliki arti kebudayaan yang dalam sehingga bersifat materialistis. Kebudayaan materialistis dengan "memiliki" sebagai modus eksistensi menumbuhkan kebudayaan yang diwarnai sifat kompetitif yang ketat sehingga memudahkan menjadi wahana untuk eksploitasi antar manusia.⁵

Keberhasilan gerakan Sarvodaya ini telah diakui negara-negara lain, terbukti dalam konferensinya yang diselenggarakan

4 Ariyatna, A.T. Sardova: Nilai-nilai Agamawi dan Tradisional, Seri Wawasan: Hak dan Kebutuhan Desa, 1983, LSP

5 Fromm, Erich, 1987, Memiliki dan Menjadi, Jakarta LP3ES

Srilangka pada bulan April 1978, yang dihadiri utusan 12 negara, dengan tema "Sarvodaya dan Perkembangan Dunia" telah menyepakati bahwa Sarvodaya menggali kekuatan nilai-nilai religius, tanpa tergantung kepada suatu agama. Juga disepakati bahwa konsep-konsep Sarvodaya setra aspirasi-aspirasinya sangat relevan dengan perkembangan dunia internasional. Di bidang pergaulan pribadi, organisasi masyarakat, pendidikan umum, kesederhanaan dalam gaya hidup, mengatasi depresi akibat pesatnya kemajuan industri, tidak sedikit pengalaman Sarvodaya yang dapat disumbangkan atas nama negara-negara dunia ke tiga kepada negara-negara kaya.

KONSEP ISLAM DALAM PEMBANGUNAN

Bila kita melihat keberhasilan program pembangunan di Srilangka dengan gerakan Sarvodayanya dalam mengangkat golongan lemah, tentunya negara kita dapat melakukan analogi. Jika Sarvodaya menggali sumber kekuatan dari nilai-nilai spiritual ajaran Buddha, maka negara kita pun dapat menggali kekuatan itu dari nilai-nilai spiritual ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dengan strategi demikian pembangunan harus menciptakan nuansa keseimbangann antara aspek material dan spiritualnya, seperti dogma Sarvodaya. Pembangunan fisik harus disertai dengan jiwa yang menggerakkan keadilan dan kebenaran. Sehingga kelompok lapisan bawah yang paling membutuhkan perbaikan seharusnya menjadi unit pertama dalam proses pembangunan. Untuk itu kita dapat menggunakan tata nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan etis gerak pem-

bangunan yang dilaksanakan. Dengan kata lain, ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Quran dapat menjadi sumber konsep dan sumber nilai karena di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang sifatnya universal dan tidak berakar pada satu kultur tertentu saja.

Dalam al-Quran tersirat ajaran bahwa Allah adalah Pemilik Sejati dari segala kekayaan di langit dan di bumi. Dia telah membuat segala kekayaan tersebut tunduk kepada manusia, khalifah-Nya di atas bumi. Pelaksanaan secara tepat dan benar untuk menikmati kekayaan-kekayaan Allah tersebut untuk kepentingan semua makhluk-Nya adalah sebuah tantangan etika dan maksud dari kekhalifahan manusia tersebut. Kriteria tertinggi untuk menentukan apakah seorang manusia adalah muslim sejati, munafik, ingkar kepada Islam tergantung kepada: apakah ia melaksanakan humanisme yang kreatif dan altruistik dengan mencari kesejahteraan pribadi melalui kesejahteraan masyarakat.

Egalitarianisme ekonomi atau hedonisme adalah batu uji keadilan sosial ekonomi Islam⁶ Prinsip altruistik dalam ekonomi bentuk konsep pemerataan itu tampak pada ajaran: apakah mereka membagi-bagikan karunia dari Tuhanmu? Kami melebihkan sebagian di antara mereka dari pada yang lainnya, sehingga sebagian di antara mereka dapat membantu yang lainnya. Sesungguhnya karunia Tuhanmu lebih baik dari pada kekayaan yang mereka timbun. (Q.S.:43;32). Bahkan Allah sendiri memberi stempel pendusta agama bagi mereka yang tidak mau membantu kaum fakir miskin dan anak-anak yatim (Q.S: 107;1-7).

Prinsip-prinsip eksploitasi antar manusia pun dilarang ajaran Islam sehingga kehadiran seorang manusia dapat menjadi rahmat bagi manusia lainnya seperti gambaran Hobbes maupun Sartre. Ajaran Islam menyatakan bahwa janganlah kamu

sekalian memakan hartamu yang kau peroleh dari sesama kamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali jalan perdagangan yang dilakukan suka sama suka, saling merelakan (Q.S.: 4: 29).

Meskipun konsep ajaran Islam sebenarnya efektif dalam menghadapi problem-problem yang tidak dapat diatasi dengan paradigma teknologi Berat, namun dalam kenyataannya banyak nada sarkastis yang dilontarkan seolah-olah ajaran Islam tidak mampu melakukan respon yang efektif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Potret seolah-olah Islam ketinggalan zaman dan rigid sebenarnya terletak pada kelemahan atau kurang kritisnya umat Islam dalam mengantisipasi gejala perkembangan zaman yang disinkronisasikan dengan ajaran Islam. Mungkin ini sebagian dari apa yang dikatakan oleh Emha Ainun Najib bahwa Islam tertutup oleh pemeluknya sendiri. Kondisi semacam, ini sering menimbulkan pandangan tidak proporsional dalam memandang pengembangan dan penerapan teknologi dengan menggunakan kacamata (nilai) agama. Ketidak proporsionalan tersebut dapat muncul dalam dua bentuk⁷, yaitu :

a. Sikap atau pemikiran yang bersifat apologetik: sikap yang membanggakan masa lalu (kejayaan Islam) tanpa memahami bagaimana kejayaan tersebut diperoleh dan dikembangkan. Sikap ini dapat merupakan kompensasi kegagalan umat dalam membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang puna dan perfektual.

b. Pendekatan miopik ialah pendekatan yang dilakukan umat (terutama pada pemuka fuqoha) yang melihat perkembangan teknologi dari satu sisi, yaitu dari sisi hukum dalam makna yang sempit. Pandangan ini sering melahirkan fatwa yang inadequate. Inadekualitas yang dimaksud ialah fatwa yang sifatnya muncul belakangan setelah banyak umat yang menggunakan

⁶ Husaini, Waqar Ahmed, 1980, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, Pustaka Bandung

⁷ Pratiknya, Ahmad Watik, Sain dan Teknologi dalam Perspektif Islam, Inovasi Jurnal UMY, 1989 No 5

baru para fuqoha menghakimi dan bersifat hitam-putih saja (halal-haram, boleh-tidak dan sebagainya). Fatawa yang demikian dalam banyak hal, di samping membingungkan umat, juga akan menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Sebagai contoh: kasus kodok, shortening, bekicot, tikus untuk bahan makan ternak dan sekarang yang banyak dicoba adalah penggunaan tepung darah untuk bahan makan ternak. Hal ini akan menimbulkan gejala/keresahan dalam masyarakat kalau sampai menyebar luas seperti terjadi pada penelitian tikus.

Ulama kita pun dalam menetapkan halal haramnya hewan ternyata banyak perbedaan. Sebagian ulama ada yang men-

gharamkann 10 jenis hewan. Ulama hadis menambahkan semua binatang buas, ahli fiqih menawarkan dan menambahkan beberapa hewan berdasarkan ijtihad mereka seperti gajah, buaya, tawan, sedang menurut Rasyid Ridha dalam tafsir Al Manarnya: semua hewan baik, bersih dan enak adalah halal, sedang semua hewan yang jelek, kotor, menjijikkan adalah haram. Tentunya kriteria jijik, kotor, baik, bersih sangat tergantung masing-masing individu.

Dari permasalahan di atas untuk mencapai pembangunan yang ideal maka pembangunan harus didasarkan pada etika yang mengutamakan kepentingan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kelompok maupun kepentingan duniawi dan ukhrowi.



Di sela-sela hutan beton yang kian melebat, masihkah manusia berpikir dalam tempurung ?